



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar perlu penyempurnaan dan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Banjar Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Mengubah Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 1) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 5 September 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 68

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR 68 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui Pengembangan sistem kesehatan.	Indeks Kesehatan	Komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Ukuran yang digunakan dalam perhitungan indeks kesehatan adalah usia harapan hidup. Merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir	$\text{Indeks Kesehatan} = \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$ Keterangan : UHH : Usia Harapan Hidup UHH _{maks} : Nilai Maksimum Usia Harapan Hidup (83,4 Tahun) UHH _{min} : Nilai Minimum Usia Harapan Hidup 0 Tahun)	Dinas Kesehatan	Badan Pusat Statistik
2.	Meningkatnya daya saing masyarakat melalui pengembangan sistem pendidikan, pelayanan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan	Indeks Pendidikan	Komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Ukuran yang digunakan dalam perhitungan indeks pendidikan adalah indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)	$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ $I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$ Keterangan : I _{HLS} : Indeks Harapan Lama Sekolah HLS : Harapan Lama Sekolah HLS _{maks} : Nilai Maksimum Harapan Lama Sekolah (18 Tahun) HLS _{min} : Nilai Minimum Harapan Lama Sekolah (0 Tahun)	Dinas Pendidikan	Badan Pusat Statistik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				I_{RLS} : Indeks Rata-Rata Lama Sekolah RLS : Rata-Rata Lama Sekolah RLS_{maks} : Nilai Maksimum Rata-Rata Lama Sekolah (15 Tahun) RLS_{min} : Nilai Minimum Rata-Rata Lama Sekolah (0 Tahun)		
3.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Daya beli	Komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Daya Beli adalah Kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan	$\text{Indeks Daya Beli} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$ Keterangan : Pengeluaran : Pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan Pengeluaran _{maks} : Nilai Maksimum Pengeluaran (26,572 Juta) Pengeluaran _{min} : Nilai Minimum Rata-Rata pengeluaran (1,007 juta) ln : logaritma natural	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Badan Pusat Statistik
4.	Meningkatnya ketahanan pangan dan gizi masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.	$IKP = \frac{\sum_{i=1}^3 \bar{x}}{3}$ Keterangan : IKP : Indeks Ketahanan Pangan i : Rata rata dimensi Dimensi Ketahanan pangan sebagai berikut : 1. Ketersediaan Pangan ; - Rasio konsumsi normative per kapita terhadap ketersediaan bersih “padi + jagung + ubikayu + ubijalar”	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				2. Akses Terhadap Pangan dan Penghidupan; <ul style="list-style-type: none"> - Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan - Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai - Persentase rumah tangga tanpa akses listrik 3. Pemanfaatan Pangan ; <ul style="list-style-type: none"> - Angka harapan hidup saat lahir - Berat badan balita di bawah standar (underweight) - Perempuan buta huruf - Rumah tangga tanpa akses ke air bersih - Persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan 		
5.	Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. Ukuran yang digunakan dalam perhitungannya adalah indikator keterlibatan perempuan di parlemen, partisipasi sebagai tenaga profesional, dan sumbangan dalam pendapatan pekerjaan	$IDG = \frac{I_{par} + I_{DM} + I_{inc-des}}{3}$ Keterangan : IDG : Indeks Pemberdayaan Gender I _{par} : Indeks keterwakilan di parlemen I _{DM} : Indeks Pengambilan Keputusan I _{inc-des} : Indeks Distribusi Pendapatan	Dinas PMD	Kemendes PDPT
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indikator menggambarkan capaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai amanat Konvensi Hak Anak (KHA)	$IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times Indeks K_j)$ Pemenuhan hak anak sebagai berikut : 1. Hak Sipil dan Kebebasan (20%)	Dinas Sosial, P3AP2KB	Dinas Sosial, P3AP2KB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (22%) 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (18%) 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (18%) 5. Perlindungan Khusus (22%)		
6.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Indeks Konektivitas	Terhubungnya wilayah di kabupaten yang di dukung oleh sarana dan prasarana transportasi yang berupa jaringan Jalan dan simpul jaringan perhubungan. Ukuran yang digunakan dalam perhitungan indeks konektivitas adalah jaringan jalan dalam kondisi mantap dan sistem jaringan transportasi dan keselamatan transportasi pada angkutan jalan dan sungai	Indek Konektivitas = 60%(Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap) + 40%(Rasio Konektivitas Kabupaten)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perhubungan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Perhubungan
7.	Meningkatnya keunggulan pertanian dan perikanan	LPE sub sektor pertanian	Sub Sektor Pertanian adalah komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Merupakan nilai produksi barang dan jasa sub sektor pertanian yang ditujukan untuk Dijual. Mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman	$LPE_{ss\ tani} = \frac{PDRB_{ss\ tani(t)} - PDRB_{ss\ tani(t-1)}}{PDRB_{ss\ tani(t-1)}} \times 100$ Keterangan : $LPE_{ss\ tani}$: LPE sub sektor pertanian (%) $PDRB_{ss\ tani(t)}$: PDRB ADHK sub sektor pertanian tahun pengamatan $PDRB_{ss\ tani(t-1)}$: PDRB ADHK sub sektor pertanian tahun pengamatan sebelumnya	Dinas Pertanian	Badan Pusat Statistik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan perburuan hewan			
		LPE sub sektor perikanan	Sub Sektor Perikanan adalah komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut.	$LPE_{ssi} = \frac{PDRB_{ssi(t)} - PDRB_{ssi(t-1)}}{PDRB_{ssi(t-1)}} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <p>LPE_{ssi} : LPE sub sektor perikanan (%)</p> <p>$PDRB_{ssi(t)}$: PDRB ADHK sub sektor perikanan tahun pengamatan</p> <p>$PDRB_{ssi(t-1)}$: PDRB ADHK sub sektor perikanan tahun pengamatan sebelumnya</p>	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Badan Pusat Statistik
8.	Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	LPE sektor industri Pengolahan	Sektor Industri Pengolahan adalah komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), merupakan kegiatan bidang ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru, termasuk perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana	$LPE_{sip} = \frac{PDRB_{sip(t)} - PDRB_{sip(t-1)}}{PDRB_{sip(t-1)}} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <p>LPE_{sip} : LPE sektor industri pengolahan (%)</p> <p>$PDRB_{sip(t)}$: PDRB ADHK sektor industri pengolahan tahun pengamatan</p> <p>$PDRB_{sip(t-1)}$: PDRB ADHK sektor industri pengolahan tahun pengamatan sebelumnya</p>	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Badan Pusat Statistik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak			
9.	Meningkatnya akselerasi industri pengolahan, Ekonomi kreatif dan Pariwisata, dan Ekonomi Digital	Jumlah kunjungan wisatawan	Wisatawan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu di wilayah Kabupaten Banjar untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri	= \sum Wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata selama 1 tahun pengamatan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	BPS / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
10.	Menurunnya Angka Pengangguran.	Tingkat Pengangguran Terbuka	pengangguran terbuka adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang tidak bekerja dengan kriteria sebagai berikut : - Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. - Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. - Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100$ <p>Keterangan: TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%) PP : Jumlah pengangguran (orang) PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Badan Pusat Statistik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.			
11.	Berkembangnya produktivitas dan daya saing Koperasi dan UM	Persentase Koperasi Berkualitas	Koperasi berkualitas adalah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), serta peningkatan volume usaha dan asset koperasi	$= \frac{\sum \text{Koperasi yang berkualitas}}{\sum \text{Koperasi}} \times 100$	Dinas Koperasi. Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Koperasi. Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
		Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan dengan modal usaha paling banyak 1 milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. wirausaha adalah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas usaha (IUMK / NIB)	$= \frac{\sum \text{Usaha Mikro yang memiliki IUMK}}{\sum \text{Usaha Mikro}} \times 100$	Dinas Koperasi. Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Koperasi. Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
12.	Berkembangnya ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produksi pertanian dan perikanan untuk mendorong kesejahteraan	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai Tukar Petani (NTP) adalah ukuran kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian	$NTP = \frac{It}{Ib} \times 100$ <p>Keterangan :</p> <p>NTP : Nilai Tukar Petani</p> <p>It : Indeks harga yang diterima petani ;</p> <p>Ib : indeks harga yang dibayar petani</p>	Dinas Pertanian	Badan Pusat Statistik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Petani dan Nelayan dan Pembudidaya Ikan					
13.	Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri	<p>Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.</p> <p>Mandiri adalah mampu berkehidupan sosial di masyarakat dengan bantuan-bantuan baik bersifat konsumtif atau berupa barang untuk beraktifitas sosial</p>	$= \frac{\text{Jumlah PPKS yang Mandiri}}{\text{Jumlah PPKS Seluruhnya}} \times 100$ <p>26 jenis PPKS sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak Balita Terlantar 2. Anak Terlantar 3. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum 4. Anak Jalanan 5. Anak Dengan Kedisabilitas 6. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 7. Lanjut Usia Terlantar 8. Penyandang Disabilitas 9. Tuna Susila 10. Gelandangan 11. Pengemis 12. Pemulung 13. Kelompok Minoritas 14. Bekas Warga Binaan Lembaga Perumahan dan Permasyarakatan 15. Orang dengan HIV/AIDS 16. Korban Penyalahgunaan NAPZA 17. Korban Trafficking 18. Korban Tindak Kekerasan 19. Pekerja Migran Bermasalah Ekonomi 20. Korban Bencana Alam 21. Korban Bencana Sosial 22. Wanita Rawan Sosial Ekonomi 23. Fakir Miskin 	Dinas Sosial, P3AP2KB	Dinas Sosial, P3AP2KB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				24. Keluarga Bermasalah Ekonomi 25. Berumah Tidak Layak Huni 26. Komunitas Adat Terpencil		
14.	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan melalui Pembangunan Perdesaan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa	$IDM = \frac{IKS \times IKE \times IKL}{3}$ Keterangan : IDM : Indeks Desa Membangun IKS : Indeks Ketahanan Pangan IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan Klasifikasi Status Desa : IDM ≤ 0,4907 =Desa Sangat Tertinggal 0,4907 < IDM ≤ 0,5989 = Desa Tertinggal 0,5989 < IDM ≤ 0,7072 = Desa Berkembang 0,7072 < IDM ≤ 0,8155 = Desa Maju IDM > 0,8155 = Desa Mandiri	Dinas PMD	Kemendes PPDT
15.	Terciptanya ekonomi keluarga yang kuat yang mampu menciptakan mandiri ekonomi rumah tangga	Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang aktif	Merupakan kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan Keluarga Sejahtera, baik Pasangan Usia Subur yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan	$= \frac{UPPKS \text{ yang Aktif}}{\text{Total UPPKS}} \times 100$	Dinas Sosial, P3AP2KB	Dinas Sosial, P3AP2KB

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
16.	Berkembangnya potensi ekonomi yang didukung peningkatan dan pemantapan infrastruktur serta infrastruktur lainnya untuk pemerataan pembangunan antar wilayah	Indeks Infrastruktur	Merupakan fasilitas infrastruktur dasar yang dapat diakses Rumah tangga meliputi jaringan drainase, akses air minum, sistem air limbah ditambah persentase Panjang jalan Poros Desa dalam kondisi mantap	Indeks infrastruktur = 10%(Persentase Luasan Kawasan Perkotaan yang terlayani sistem jaringan drainase) + 30%(Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum) + 25%(Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah yang Memadai) + 35%(Persentase Panjang Jalan yang Direhabilitasi/ Dipelihara (Poros Desa)		
17.	Terwujudnya penataan ruang yang terintegrasi dengan seluruh sektor pembangunan daerah	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang adalah pemanfaatan ruang dan penerbitan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang = 70%(Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang) + 30%(Persentase Ijin yang Dikeluarkan yang Sesuai dengan Tata Ruang)		
18.	Terciptanya pemukiman yang nyaman dan layak huni	Persentase Kawasan Kumuh	Merupakan Kawasan permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat	$\text{Persentase Kawasan Kumuh} = \frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Pemukiman Terbangun}} \times 100$	BPBD	BPBD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
19.	Terkelolanya Mitigasi Perubahan Iklim dan kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	Resiko bencana di suatu wilayah berdasarkan pada penilaian bahaya, kerentanan dan kapasitas	$R = H \times \frac{V}{C}$ Keterangan R : Indeks Risiko Bencana H : Indeks Bahaya (Hazard) V : Indeks Kerentanan (Vulnerability) C : Indeks Kapasitas (Capacity)		
20.	Menurunnya pelanggaran hukum Bidang lingkungan hidup	Jumlah pelanggaran Lingkungan Hidup	Pelanggaran lingkungan hidup adalah pelanggaran dengan ketentuan(1) pencemaran lingkungan hidup, (2) perusakan lingkungan hidup, dan (3) perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang- undangan tentang lingkungan hidup yang berlaku	= \sum Jumlah pelanggaran Lingkungan Hidup dalam 1 (satu) tahun pengamatan	Disperkim LH	Disperkim LH
21.	Terselenggaranya Reformasi sumber- sumber pendapatan daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam satu tahun anggaran	$= \frac{PAD_{(t)} - PAD_{(t-1)}}{PAD_{(t-1)}} \times 100$ Keterangan : PAD_t : LPE sektor industri pengolahan (%) $PAD_{(t)}$: PAD pada tahun pengamatan $PAD_{(t-1)}$: PAD tahun pengamatan sebelumnya	BPKPAD	BPKPAD
22.	Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara	Hasil Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya			
23.	Terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP di Kabupaten Banjar oleh Kemanpan RB	Sekretariat Daerah	Kemanpan RB
		Nilai Opini BPK	Opini BPK adalah opini hasil laporan audit yang diberikan oleh BPK sebagai hasil kewajaran laporan keuangan yang disajikan Pemerintah Kabupaten Banjar	Empat jenis opini BPK yaitu: 1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 3. Opini Tidak Wajar (TW) 4. Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	BPKPAD	BPKPAD
24.	Terselenggaranya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Perilaku Anti Korupsi	IPAK merupakan ukuran tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi	Merupakan nilai dari hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Nilai IPAK berkisar pada skala 0 sampai 5	Inspektorat	BPS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>dan mencakup tiga fenomena utama korupsi, yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme (nepotism). Disusun berdasarkan Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat.</p>	<p>Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat kian berperilaku antikorupsi. Sebaliknya, nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat kian berperilaku permisif terhadap korupsi</p>		
25.	Berkembangnya profesional ASN	Indeks Profesionalitas ASN	<p>Instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN</p>	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ <p>Indeks Profesionalitas ASN merupakan jumlah nilai pembobotan dari dimensi berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensi Kualifikasi - Dimensi Kompetensi - Dimensi Kinerja - Dimensi Disiplin <p>Predikat Nilai IPAK sebagai berikut</p> <p>91 – 100 = Sangat Tinggi 81 – 90 = Tinggi 71 – 80 = Sedang 61 – 70 = Rendah 60 ke bawah = Sangat Rendah</p>	BKPSDM	BKPSDM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
26.	Berkembangnya sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan layanan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Indeks SPBE merepresentasikan tingkat penyelenggaraan SPBE secara keseluruhan	Nilai Indeks SPBE merupakan jumlah nilai pembobotan dari Domain berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Domain 1 Kebijakan SPBE - Domain 2 Tata Kelola - Domain 3 Penerapan Manajemen - Domain 4 Layanan SPBE Predikat Nilai SPBE sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> 4,2 – 5,0 = Memuaskan 3,5 – < 4,2 = Sangat Baik 2,6 – < 3,5 = Baik 1,8 – < 2,6 = Cukup < 1,8 = Kurang 	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Kemenpan RB
27.	Meningkatnya pengamalan nilai- nilai Pancasila dan nilai-nilai agama	Angka kasus konflik ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Masyarakat	Merupakan Jumlah kejadian benturan/ bentrok fisik antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung, dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan terganggunya stabilitas daerah yang diakibatkan konflik ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Masyarakat	= \sum kasus konflik ideologi, SARA, Sosial, Budaya dan Ekonomi di Masyarakat dalam 1(satu) tahun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
28.	Berkembangnya seni budaya Banjar dan seni budaya religius yang mencerminkan karakter dan kepribadian luhur masyarakat Banjar;	Jumlah apresiasi Budaya Banjar	Pemahaman, kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk menerima dan memberikan penghargaan, penilaian terhadap seni dan budaya Banjar	$= \sum$ Kegiatan budaya banjar yang di apresiasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
29.	Meningkatnya peran serta pemuda dan santri dalam memajukan olahraga	Prestasi pemuda dan Santri dalam Olahraga	Pemuda dan santri yang berprestasi di bidang olahraga pada tingkat provinsi dan nasional	$= \sum$ medali dari Pemuda dan santri yang berprestasi	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
30.	Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman di masyarakat	Rasio Pelanggaran perda dan trantibum	Merupakan pelanggaran terhadap perda yang ditegakkan serta pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) tahun	$= \frac{\text{Jumlah Pelanggaran perda dan trantibum}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Berkembangnya profesional ASN	Indeks Profesional ASN	Perhitungan sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya"	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $IP = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.	Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang aman, tentram dan damai	1. Angka kasus konflik sosial	Jumlah kejadian benturan/bentrok fisik antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan terganggunya stabilitas di daerah	Jumlah angka kasus kejadian konflik sosial yang terjadi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Polres Banjar 2. Laporan Masyarakat
		2. Persentase kesepakatan FKUB yang ditindaklanjuti	Persentase jumlah poin kesepakatan antara FKUB Kab. Banjar dengan Pemkab Banjar (Kesbangpol) yang dapat ditindaklanjuti secara Bersama oleh kedua belah pihak dan atau salah satu pihak	$= \frac{\sum \text{Kesepakatan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Kesepakatan yang dibuat}} \times 100$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya wawasan dan pemahaman masyarakat dibidang politik	Persentase cakupan pendidikan politik masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapat pendidikan politik dan nilai-nilai demokrasi	$\frac{\sum \text{Masyarakat yang mendapat pendidikan politik}}{\sum \text{Masyarakat sasaran pendidikan politik}} \times 100$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Komisi Pemilihan Umum

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3.	Terwujudnya Penanggulangan Bencana Alam	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten/Kota adalah nilai gabungan antara Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat dan Indeks Ketahanan	<p><i>Indeks Kapasitas Daerah</i> $= (0,6 \times \text{Skor Kesiapsiagaan}) + (0,4 \times \text{Skor Ketahanan})$</p> <p><i>Keterangan parameter dan bobot :</i> <i>Kesiapsiagaan 60%</i> <i>Ketahanan 40%</i></p>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
4.	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah Meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	<p>Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKAD) adalah suatu ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.</p> <p>Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.</p> <p>Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.</p> <p>Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penatausahaan, pemanfaatan dan pengendalian serta pengawasan barang milik daerah</p>	$= \frac{(\text{nilai penyajian dokumen penganggaran} + \text{nilai prosentase penyerapan anggaran} + \text{nilai penyajian laporan keuangan} + \text{prosentase pengelolaan BMD})}{4}$	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	<p>Perbandingan antara realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya;</p> <p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;</p> <p>PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah</p>	$= \frac{\text{realisasi tahun } n - \text{realisasi tahun } n - 1}{\text{realisasi tahun } n - 1} \times 100\%$	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
5.	Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan penilaian terhadap kualitas perencanaan pembangunan daerah. Yang diukur melalui 4 (empat) aspek penilaian sebagai berikut :	<p><i>Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPD) =</i></p> $\sum \{ \text{Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah (AP1)} + \text{Sinkronisasi Perencanaan \& Penganggaran Pembangunan Daerah (AP2)} + \text{Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah \& SKPD (AP3)} + \text{Kinerja Efektivitas Pengendalian Pembangunan Daerah (AP4)} \}$ <p>Berikut Ini 4 (empat) aspek penilaian pada formulasi diatas :</p> <p>1. Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																																																																																																																																																																																																																																																																			
			<p>TABEL PENILAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDALITBANG KABUPATEN BANJAR</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>ASPEK PENILAIAN</th> <th>POIN PENGUKURAN</th> <th>BOBOT MAKSIMAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">1 Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Definisi :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Keterpaduan program antar dokumen perencanaan untuk mencapai sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam rencana kerja SKPD.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Keterpaduan Program RKPD dengan Program RPJMD</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Keterpaduan Program Renja SKPD dengan Program Prioritas (PP)</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Keterpaduan Program Renstra SKPD dengan Program RPJMD</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Keterpaduan Kegiatan Renja SKPD dengan Kegiatan Renstra SKPD</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">2 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Definisi :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Keterpaduan dukungan anggaran SKPD untuk mencapai sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam rencana kerja SKPD.</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Proyek Prioritas pada Renja SKPD yang masuk dalam RKA SKPD berbasis pada pencapaian sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKPD</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">3 Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Definisi :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Keterpaduan dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas dalam RKPD melalui Keterpaduan IKU Daerah dengan IKU SKPD</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Jumlah SKPD yang IKU nya selaras dengan IKU Daerah</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">4 Kinerja Efektifitas Pengendalian Pembangunan Daerah</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Definisi :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dilakukan oleh SKPD dalam rangka pencapaian sasaran/target Prioritas Daerah, Program Prioritas, Proyek Prioritas dan Sasaran Sektor/Bidang dalam RKPD</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>88</td> </tr> </tbody> </table> <p>Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah selain digunakan untuk mengukur kinerja penyusunan rencana pembangunan oleh Bappedalitbang, dapat pula digunakan untuk mengukur kinerja</p>	NO	ASPEK PENILAIAN	POIN PENGUKURAN	BOBOT MAKSIMAL	1 Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah				Definisi :				Keterpaduan program antar dokumen perencanaan untuk mencapai sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam rencana kerja SKPD.				1	Keterpaduan Program RKPD dengan Program RPJMD	6		2	Keterpaduan Program Renja SKPD dengan Program Prioritas (PP)	6		3	Keterpaduan Program Renstra SKPD dengan Program RPJMD	6		4	Keterpaduan Kegiatan Renja SKPD dengan Kegiatan Renstra SKPD	6		2 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah				Definisi :				Keterpaduan dukungan anggaran SKPD untuk mencapai sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam rencana kerja SKPD.				1	Proyek Prioritas pada Renja SKPD yang masuk dalam RKA SKPD berbasis pada pencapaian sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKPD	18		3 Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD				Definisi :				Keterpaduan dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas dalam RKPD melalui Keterpaduan IKU Daerah dengan IKU SKPD				1	Jumlah SKPD yang IKU nya selaras dengan IKU Daerah	20		4 Kinerja Efektifitas Pengendalian Pembangunan Daerah				Definisi :				Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah				1	Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dilakukan oleh SKPD dalam rangka pencapaian sasaran/target Prioritas Daerah, Program Prioritas, Proyek Prioritas dan Sasaran Sektor/Bidang dalam RKPD	18		TOTAL							88	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>DEFINISI</th> <th>POIN PENGUKURAN</th> <th>BOBOT MAKSIMAL PER FOKUS</th> <th>PENJELASAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">AP 1 : Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah</td> </tr> <tr> <td rowspan="12">1</td> <td rowspan="12">Keterpaduan program antar dokumen perencanaan untuk mencapai sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam rencana kerja SKPD.</td> <td>Keterpaduan Program RKPD dengan Program RPJMD</td> <td>6</td> <td>Yang dimaksud selaras jika : 1. Jumlah program di RKPD tidak melebihi jumlah program di RPJMD (Program RKPD : Program RPJMD) 2. Nomenklatur Program di RKPD ada didalam RPJMD</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RENTANG KESELARASAN</td> <td>NILAI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 Komponen Terpenuhi</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Komponen Terpenuhi</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Keterpaduan Program Renja SKPD dengan Program Prioritas (PP)</td> <td>6</td> <td>Yang dimaksud selaras jika : 1. Program-prioritas di RPJMD yang masuk dalam Renja SKPD sesuai dengan Tudi nya RPJMD</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RENTANG KESELARASAN</td> <td>NILAI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terpenuhi 100%</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50 < x < 99</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25 < x < 49</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 < x < 24</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tidak sama sekali</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Keterpaduan Program Renstra SKPD dengan Program RPJMD</td> <td>6</td> <td>Yang dimaksud selaras jika : 1. Nomenklatur program di Renstra yang ada di dalam RPJMD 2. Jumlah program di Renstra seluruh SKPD tidak melebihi jumlah program di RPJMD</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RENTANG KESELARASAN</td> <td>NILAI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 Komponen Terpenuhi</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Komponen Terpenuhi</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Keterpaduan Kegiatan Renja SKPD dengan Kegiatan Renstra SKPD</td> <td>6</td> <td>Yang dimaksud selaras jika : 1. Nomenklatur kegiatan di Renja Seluruh SKPD yang ada di dalam Renstra Seluruh SKPD 2. Jumlah kegiatan di Renja seluruh SKPD tidak melebihi jumlah kegiatan di Renstra Seluruh SKPD</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RENTANG KESELARASAN</td> <td>NILAI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 Komponen Terpenuhi</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 Komponen Terpenuhi</td> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL NILAI MAKSIMAL AP 1</td> <td>24</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">2. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>DEFINISI</th> <th>POIN PENGUKURAN</th> <th>BOBOT MAKSIMAL PER FOKUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">AP 2 : Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">1</td> <td rowspan="5">AP 2 : Keterpaduan dukungan anggaran SKPD untuk mencapai sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam rencana kerja SKPD</td> <td>Proyek Prioritas pada Renja SKPD yang masuk dalam RKA SKPD berbasis pada pencapaian sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKPD</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RENTANG KESELARASAN</td> <td>NILAI</td> </tr> <tr> <td>Terpenuhi 100%</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 < x < 100</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tidak sama sekali</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL NILAI MAKSIMAL AP 2</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5">3. Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>DEFINISI</th> <th>POIN PENGUKURAN</th> <th>BOBOT MAKSIMAL PER FOKUS</th> <th>PENJELASAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">AP 3 : Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">1</td> <td rowspan="6">Keterpaduan dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas dalam RKPD melalui Keterpaduan IKU Daerah dengan IKU SKPD</td> <td>Jumlah SKPD yang IKU nya selaras dengan IKU Daerah</td> <td>20</td> <td>Selaras jika :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RENTANG KESELARASAN</td> <td>NILAI</td> <td>1. IKU SKPD adalah turunan dari IKU Daerah</td> </tr> <tr> <td>91 - 100 %</td> <td>20</td> <td>2. Perbandingan cascading SKPD dengan cascading Kabupaten</td> </tr> <tr> <td>75 sd 90 %</td> <td>15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>50 sd 74 %</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>< 50 %</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL NILAI MAKSIMAL AP 3</td> <td>25</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	NO	DEFINISI	POIN PENGUKURAN	BOBOT MAKSIMAL PER FOKUS	PENJELASAN	AP 1 : Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah					1	Keterpaduan program antar dokumen perencanaan untuk mencapai sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam rencana kerja SKPD.	Keterpaduan Program RKPD dengan Program RPJMD	6	Yang dimaksud selaras jika : 1. Jumlah program di RKPD tidak melebihi jumlah program di RPJMD (Program RKPD : Program RPJMD) 2. Nomenklatur Program di RKPD ada didalam RPJMD	RENTANG KESELARASAN		NILAI		1 Komponen Terpenuhi	3			2 Komponen Terpenuhi	6			Keterpaduan Program Renja SKPD dengan Program Prioritas (PP)	6	Yang dimaksud selaras jika : 1. Program-prioritas di RPJMD yang masuk dalam Renja SKPD sesuai dengan Tudi nya RPJMD	RENTANG KESELARASAN		NILAI		Terpenuhi 100%	6			50 < x < 99	5			25 < x < 49	4			0 < x < 24	3			Tidak sama sekali	0			Keterpaduan Program Renstra SKPD dengan Program RPJMD	6	Yang dimaksud selaras jika : 1. Nomenklatur program di Renstra yang ada di dalam RPJMD 2. Jumlah program di Renstra seluruh SKPD tidak melebihi jumlah program di RPJMD	RENTANG KESELARASAN		NILAI		1 Komponen Terpenuhi	3			2 Komponen Terpenuhi	6			Keterpaduan Kegiatan Renja SKPD dengan Kegiatan Renstra SKPD	6	Yang dimaksud selaras jika : 1. Nomenklatur kegiatan di Renja Seluruh SKPD yang ada di dalam Renstra Seluruh SKPD 2. Jumlah kegiatan di Renja seluruh SKPD tidak melebihi jumlah kegiatan di Renstra Seluruh SKPD	RENTANG KESELARASAN		NILAI		1 Komponen Terpenuhi	3			2 Komponen Terpenuhi	6			TOTAL NILAI MAKSIMAL AP 1			24		2. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah					<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>DEFINISI</th> <th>POIN PENGUKURAN</th> <th>BOBOT MAKSIMAL PER FOKUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">AP 2 : Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">1</td> <td rowspan="5">AP 2 : Keterpaduan dukungan anggaran SKPD untuk mencapai sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam rencana kerja SKPD</td> <td>Proyek Prioritas pada Renja SKPD yang masuk dalam RKA SKPD berbasis pada pencapaian sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKPD</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RENTANG KESELARASAN</td> <td>NILAI</td> </tr> <tr> <td>Terpenuhi 100%</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 < x < 100</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tidak sama sekali</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL NILAI MAKSIMAL AP 2</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>					NO	DEFINISI	POIN PENGUKURAN	BOBOT MAKSIMAL PER FOKUS	AP 2 : Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah				1	AP 2 : Keterpaduan dukungan anggaran SKPD untuk mencapai sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam rencana kerja SKPD	Proyek Prioritas pada Renja SKPD yang masuk dalam RKA SKPD berbasis pada pencapaian sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKPD	18	RENTANG KESELARASAN		NILAI	Terpenuhi 100%	18		0 < x < 100	9		Tidak sama sekali	0		TOTAL NILAI MAKSIMAL AP 2			18	3. Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah					<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>DEFINISI</th> <th>POIN PENGUKURAN</th> <th>BOBOT MAKSIMAL PER FOKUS</th> <th>PENJELASAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">AP 3 : Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">1</td> <td rowspan="6">Keterpaduan dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas dalam RKPD melalui Keterpaduan IKU Daerah dengan IKU SKPD</td> <td>Jumlah SKPD yang IKU nya selaras dengan IKU Daerah</td> <td>20</td> <td>Selaras jika :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RENTANG KESELARASAN</td> <td>NILAI</td> <td>1. IKU SKPD adalah turunan dari IKU Daerah</td> </tr> <tr> <td>91 - 100 %</td> <td>20</td> <td>2. Perbandingan cascading SKPD dengan cascading Kabupaten</td> </tr> <tr> <td>75 sd 90 %</td> <td>15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>50 sd 74 %</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>< 50 %</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL NILAI MAKSIMAL AP 3</td> <td>25</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					NO	DEFINISI	POIN PENGUKURAN	BOBOT MAKSIMAL PER FOKUS	PENJELASAN	AP 3 : Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD					1	Keterpaduan dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas dalam RKPD melalui Keterpaduan IKU Daerah dengan IKU SKPD	Jumlah SKPD yang IKU nya selaras dengan IKU Daerah	20	Selaras jika :	RENTANG KESELARASAN		NILAI	1. IKU SKPD adalah turunan dari IKU Daerah	91 - 100 %	20	2. Perbandingan cascading SKPD dengan cascading Kabupaten	75 sd 90 %	15		50 sd 74 %	10		< 50 %	5		TOTAL NILAI MAKSIMAL AP 3			25	
NO	ASPEK PENILAIAN	POIN PENGUKURAN	BOBOT MAKSIMAL																																																																																																																																																																																																																																																																						
1 Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																									
Definisi :																																																																																																																																																																																																																																																																									
Keterpaduan program antar dokumen perencanaan untuk mencapai sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam rencana kerja SKPD.																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	Keterpaduan Program RKPD dengan Program RPJMD	6																																																																																																																																																																																																																																																																							
2	Keterpaduan Program Renja SKPD dengan Program Prioritas (PP)	6																																																																																																																																																																																																																																																																							
3	Keterpaduan Program Renstra SKPD dengan Program RPJMD	6																																																																																																																																																																																																																																																																							
4	Keterpaduan Kegiatan Renja SKPD dengan Kegiatan Renstra SKPD	6																																																																																																																																																																																																																																																																							
2 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																									
Definisi :																																																																																																																																																																																																																																																																									
Keterpaduan dukungan anggaran SKPD untuk mencapai sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam rencana kerja SKPD.																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	Proyek Prioritas pada Renja SKPD yang masuk dalam RKA SKPD berbasis pada pencapaian sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKPD	18																																																																																																																																																																																																																																																																							
3 Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD																																																																																																																																																																																																																																																																									
Definisi :																																																																																																																																																																																																																																																																									
Keterpaduan dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas dalam RKPD melalui Keterpaduan IKU Daerah dengan IKU SKPD																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	Jumlah SKPD yang IKU nya selaras dengan IKU Daerah	20																																																																																																																																																																																																																																																																							
4 Kinerja Efektifitas Pengendalian Pembangunan Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																									
Definisi :																																																																																																																																																																																																																																																																									
Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dilakukan oleh SKPD dalam rangka pencapaian sasaran/target Prioritas Daerah, Program Prioritas, Proyek Prioritas dan Sasaran Sektor/Bidang dalam RKPD	18																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																									
			88																																																																																																																																																																																																																																																																						
NO	DEFINISI	POIN PENGUKURAN	BOBOT MAKSIMAL PER FOKUS	PENJELASAN																																																																																																																																																																																																																																																																					
AP 1 : Integrasi Perencanaan Pembangunan Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	Keterpaduan program antar dokumen perencanaan untuk mencapai sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam rencana kerja SKPD.	Keterpaduan Program RKPD dengan Program RPJMD	6	Yang dimaksud selaras jika : 1. Jumlah program di RKPD tidak melebihi jumlah program di RPJMD (Program RKPD : Program RPJMD) 2. Nomenklatur Program di RKPD ada didalam RPJMD																																																																																																																																																																																																																																																																					
		RENTANG KESELARASAN		NILAI																																																																																																																																																																																																																																																																					
		1 Komponen Terpenuhi	3																																																																																																																																																																																																																																																																						
		2 Komponen Terpenuhi	6																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Keterpaduan Program Renja SKPD dengan Program Prioritas (PP)	6	Yang dimaksud selaras jika : 1. Program-prioritas di RPJMD yang masuk dalam Renja SKPD sesuai dengan Tudi nya RPJMD																																																																																																																																																																																																																																																																					
		RENTANG KESELARASAN		NILAI																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Terpenuhi 100%	6																																																																																																																																																																																																																																																																						
		50 < x < 99	5																																																																																																																																																																																																																																																																						
		25 < x < 49	4																																																																																																																																																																																																																																																																						
		0 < x < 24	3																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Tidak sama sekali	0																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Keterpaduan Program Renstra SKPD dengan Program RPJMD	6	Yang dimaksud selaras jika : 1. Nomenklatur program di Renstra yang ada di dalam RPJMD 2. Jumlah program di Renstra seluruh SKPD tidak melebihi jumlah program di RPJMD																																																																																																																																																																																																																																																																					
RENTANG KESELARASAN		NILAI																																																																																																																																																																																																																																																																							
1 Komponen Terpenuhi	3																																																																																																																																																																																																																																																																								
2 Komponen Terpenuhi	6																																																																																																																																																																																																																																																																								
Keterpaduan Kegiatan Renja SKPD dengan Kegiatan Renstra SKPD	6	Yang dimaksud selaras jika : 1. Nomenklatur kegiatan di Renja Seluruh SKPD yang ada di dalam Renstra Seluruh SKPD 2. Jumlah kegiatan di Renja seluruh SKPD tidak melebihi jumlah kegiatan di Renstra Seluruh SKPD																																																																																																																																																																																																																																																																							
RENTANG KESELARASAN		NILAI																																																																																																																																																																																																																																																																							
1 Komponen Terpenuhi	3																																																																																																																																																																																																																																																																								
2 Komponen Terpenuhi	6																																																																																																																																																																																																																																																																								
TOTAL NILAI MAKSIMAL AP 1			24																																																																																																																																																																																																																																																																						
2. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>DEFINISI</th> <th>POIN PENGUKURAN</th> <th>BOBOT MAKSIMAL PER FOKUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">AP 2 : Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">1</td> <td rowspan="5">AP 2 : Keterpaduan dukungan anggaran SKPD untuk mencapai sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam rencana kerja SKPD</td> <td>Proyek Prioritas pada Renja SKPD yang masuk dalam RKA SKPD berbasis pada pencapaian sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKPD</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RENTANG KESELARASAN</td> <td>NILAI</td> </tr> <tr> <td>Terpenuhi 100%</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0 < x < 100</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tidak sama sekali</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL NILAI MAKSIMAL AP 2</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table>					NO	DEFINISI	POIN PENGUKURAN	BOBOT MAKSIMAL PER FOKUS	AP 2 : Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah				1	AP 2 : Keterpaduan dukungan anggaran SKPD untuk mencapai sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam rencana kerja SKPD	Proyek Prioritas pada Renja SKPD yang masuk dalam RKA SKPD berbasis pada pencapaian sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKPD	18	RENTANG KESELARASAN		NILAI	Terpenuhi 100%	18		0 < x < 100	9		Tidak sama sekali	0		TOTAL NILAI MAKSIMAL AP 2			18																																																																																																																																																																																																																																									
NO	DEFINISI	POIN PENGUKURAN	BOBOT MAKSIMAL PER FOKUS																																																																																																																																																																																																																																																																						
AP 2 : Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	AP 2 : Keterpaduan dukungan anggaran SKPD untuk mencapai sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam rencana kerja SKPD	Proyek Prioritas pada Renja SKPD yang masuk dalam RKA SKPD berbasis pada pencapaian sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas, dan sasaran sektor/bidang dalam RKPD	18																																																																																																																																																																																																																																																																						
		RENTANG KESELARASAN		NILAI																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Terpenuhi 100%	18																																																																																																																																																																																																																																																																						
		0 < x < 100	9																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Tidak sama sekali	0																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL NILAI MAKSIMAL AP 2			18																																																																																																																																																																																																																																																																						
3. Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>DEFINISI</th> <th>POIN PENGUKURAN</th> <th>BOBOT MAKSIMAL PER FOKUS</th> <th>PENJELASAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">AP 3 : Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">1</td> <td rowspan="6">Keterpaduan dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas dalam RKPD melalui Keterpaduan IKU Daerah dengan IKU SKPD</td> <td>Jumlah SKPD yang IKU nya selaras dengan IKU Daerah</td> <td>20</td> <td>Selaras jika :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RENTANG KESELARASAN</td> <td>NILAI</td> <td>1. IKU SKPD adalah turunan dari IKU Daerah</td> </tr> <tr> <td>91 - 100 %</td> <td>20</td> <td>2. Perbandingan cascading SKPD dengan cascading Kabupaten</td> </tr> <tr> <td>75 sd 90 %</td> <td>15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>50 sd 74 %</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>< 50 %</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL NILAI MAKSIMAL AP 3</td> <td>25</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					NO	DEFINISI	POIN PENGUKURAN	BOBOT MAKSIMAL PER FOKUS	PENJELASAN	AP 3 : Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD					1	Keterpaduan dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas dalam RKPD melalui Keterpaduan IKU Daerah dengan IKU SKPD	Jumlah SKPD yang IKU nya selaras dengan IKU Daerah	20	Selaras jika :	RENTANG KESELARASAN		NILAI	1. IKU SKPD adalah turunan dari IKU Daerah	91 - 100 %	20	2. Perbandingan cascading SKPD dengan cascading Kabupaten	75 sd 90 %	15		50 sd 74 %	10		< 50 %	5		TOTAL NILAI MAKSIMAL AP 3			25																																																																																																																																																																																																																																		
NO	DEFINISI	POIN PENGUKURAN	BOBOT MAKSIMAL PER FOKUS	PENJELASAN																																																																																																																																																																																																																																																																					
AP 3 : Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan SKPD																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	Keterpaduan dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Daerah (PD), Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas dalam RKPD melalui Keterpaduan IKU Daerah dengan IKU SKPD	Jumlah SKPD yang IKU nya selaras dengan IKU Daerah	20	Selaras jika :																																																																																																																																																																																																																																																																					
		RENTANG KESELARASAN		NILAI	1. IKU SKPD adalah turunan dari IKU Daerah																																																																																																																																																																																																																																																																				
		91 - 100 %	20	2. Perbandingan cascading SKPD dengan cascading Kabupaten																																																																																																																																																																																																																																																																					
		75 sd 90 %	15																																																																																																																																																																																																																																																																						
		50 sd 74 %	10																																																																																																																																																																																																																																																																						
		< 50 %	5																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL NILAI MAKSIMAL AP 3			25																																																																																																																																																																																																																																																																						

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																																				
		<p>2. Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan</p>	<p>Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan adalah hasil Penelitian dan Pengembangan n-1 yang dimanfaatkan berdasarkan salah satu kriteria berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - tertuang di dalam rencana kerja perangkat daerah - tertuang di dalam prioritas daerah - tertuang di dalam perumusan kebijakan yang dibuktikan dengan data dukung/laporan/berita acara 	<p>4. Kinerja Efektivitas Pengendalian Pembangunan Daerah</p> <table border="1" data-bbox="1241 345 1888 662"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>DEFINISI</th> <th>POIN PENGUKURAN</th> <th>BOBOT MAKSIMAL PER FOKUS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">AP 4 : Kinerja Efektivitas Pengendalian Pembangunan Daerah</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>AP 4 : Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah</td> <td>Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh SKPD dalam rangka pencapaian sasaran/target Prioritas Daerah, Program Prioritas, Proyek Prioritas dan Sasaran Sektor/Bidang dalam RKPD</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>RENTANG KESELARASAN</td> <td>NILAI</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>91 - 100 %</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>75 sd 90 %</td> <td>13,5</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>50 sd 74 %</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>< 50 %</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TOTAL NILAI MAKSIMAL AP 4</td> <td>18</td> </tr> </tbody> </table> $= \frac{(\text{Hasil Penelitian yang dimanfaatkan Tahun lalu})}{(\text{Jumlah Hasil Penelitian Tahun lalu})} \times 100\%$	NO	DEFINISI	POIN PENGUKURAN	BOBOT MAKSIMAL PER FOKUS	AP 4 : Kinerja Efektivitas Pengendalian Pembangunan Daerah				1	AP 4 : Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh SKPD dalam rangka pencapaian sasaran/target Prioritas Daerah, Program Prioritas, Proyek Prioritas dan Sasaran Sektor/Bidang dalam RKPD	18			RENTANG KESELARASAN	NILAI			91 - 100 %	18			75 sd 90 %	13,5			50 sd 74 %	9			< 50 %	4,5	TOTAL NILAI MAKSIMAL AP 4			18	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan</p>
NO	DEFINISI	POIN PENGUKURAN	BOBOT MAKSIMAL PER FOKUS																																							
AP 4 : Kinerja Efektivitas Pengendalian Pembangunan Daerah																																										
1	AP 4 : Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah	Rekomendasi kebijakan pengendalian yang dijalankan oleh SKPD dalam rangka pencapaian sasaran/target Prioritas Daerah, Program Prioritas, Proyek Prioritas dan Sasaran Sektor/Bidang dalam RKPD	18																																							
		RENTANG KESELARASAN	NILAI																																							
		91 - 100 %	18																																							
		75 sd 90 %	13,5																																							
		50 sd 74 %	9																																							
		< 50 %	4,5																																							
TOTAL NILAI MAKSIMAL AP 4			18																																							
6.	<p>Meningkatnya Pengembangan Kepariwisata Daerah</p>	<p>1. Jumlah Kunjungan Wisata</p>	<p>Wisatawan adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan perjalanan dengan mengunjungi tempat tertentu di wilayah Kabupaten Banjar untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri</p>	<p>Penjumlahan dari wisatawan per hari yang berkunjung ke tempat destinasi wisata</p>	<p>Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata</p>	<p>Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata</p>																																				

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Lama Kunjungan Wisata	Lama kunjungan adalah banyaknya hari yang dihabiskan wisatawan di Kabupaten Banjar.	Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		3. Pengeluaran Wisatawan	<p>Pengeluaran wisatawan adalah jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan selama melakukan perjalanan wisata di Kabupaten Banjar</p> <p>Pengeluaran wisatawan merupakan penjumlahan dari biaya yang dikeluarkan wisatawan setiap wisatawan per hari untuk keperluan :</p> <p>a. Akomodasi adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk akomodasi dan pengeluaran makan dan minum yang tidak dapat dipisahkan dengan akomodasi.</p> <p>b. Makan dan minum adalah semua pengeluaran makan dan minum selama melakukan perjalanan.</p> <p>c. Transportasi lokal adalah pengeluaran untuk transportasi lokal yang digunakan selama berada di Kabupaten Banjar, dalam hal ini transportasi yang digunakan adalah transportasi darat, dan laut/penyeberangan.</p>	$= \frac{\text{Pengeluaran seluruh wisatawan (yang disurvei)}}{\text{jumlah wisatawan (yang disurvei)}}$	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			d. Belanja adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk keperluan belanja kebutuhan selama berada di kabupaten Banjar.			
	Meningkatnya Pelestarian Budaya	Cakupan Pelestarian Budaya	Cakupan pelestarian budaya adalah unsur budaya benda dan tak benda yang telah di lakukan upaya perlindungan/pengembangan/pemanfaatan	$= \frac{\text{jumlah unsur benda dan tak benda yang telah dilestarikan}}{\text{seluruh unsur budaya benda dan tak benda}} \times 100$	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
	Meningkatnya Prestasi Olahraga serta Pemuda yang berkarakter dan Mandiri	1. Jumlah Medali dari Prestasi Olahraga	Prestasi olahraga adalah atlet yang mendapatkan medali. Prestasi dalam olahraga adalah atlet yang memperoleh medali dalam event olahraga. Event olahraga yang diikuti adalah event /kejuaraan provinsi,kejuaraan nasional dan internasional Medali yang diperoleh meliputi emas, perak, dan perunggu.	Jumlah Medali dari Prestasi dari event atau kejuaraan provinsi, kejuaraan Nasional dan Internasional.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		2. Jumlah Pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi dan Nasional	Jumlah pemuda yang mengikuti lomba atau seleksi yang mewakili kabupaten ke tingkat provinsi maupun nasional dan masuk dalam kategori juara lomba IMTAQ,PASKIBRAKA PEMUDA PELOPOR PPAN, KUPP, JPI, Kepramukaan, dan kegiatan kepemudaan lainnya. Kategori juara: yang mendapatkan piala dan piagam penghargaan.	Jumlah Pemuda yang mendapatkan piala atau piagam penghargaan.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3. Persentase Wirausaha Muda	Wirausaha Muda adalah pemuda yang memiliki izin usaha, mampu membuka lapangan kerja, serta menghasilkan barang atau jasa	$= \frac{\text{Jumlah wirausaha muda}}{\text{Jumlah pemuda suatu daerah}} \times 100\%$	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
7.	Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Diperoleh dari nilai SKM Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang (0,11)	$= \frac{\text{total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times 0,11$ $= \text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap	Jumlah penduduk yang Memiliki dokumen yang lengkap (meliputi: akta+KK+KTP-el atau KIA) dibagi jumlah penduduk Kabupaten Banjar dikali 100 persen	$= \frac{\text{Jumlah penduduk yang lengkap dokumen kependudukan}}{\text{Jumlah penduduk Kab. Banjar}} \times 100\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8.	Menurunnya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Neonatus, Angka Kematian Bayi dan Stunting	1. Angka kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup adalah banyaknya kematian yang terjadi pada Ibu hamil karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas per 100.000 Kelahiran Hidup. Penyebab kematian antara lain : Pendarahan, infeksi, Eklamsi dll	$= \frac{\text{Jumlah kematian ibu melahirkan}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		2. Angka Kematian Neonatus (AKN) per 1000 Kelahiran Hidup	Angka kematian neonates per 1000 Kelahiran Hidup adalah Banyaknya kematian neonatus s/d usia 28 hari per 1.000 Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu. Penyebab kematian antara lain : Asfiksia, Bayi Berat Lahir Rendah, Infeksi, kelainan bawaan dll	$= \frac{\text{Jumlah kematian neonatal}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu yang sama}} \times 1000$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup adalah Banyaknya kematian bayi dari 0 hari s/d 11 bulan 29 hari per 1.000 Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu. Penyebab kematian antara lain : Sepsis, Asfiksia, Bayi berat lahir rendah, Infeksi dll	$= \frac{\text{Jumlah kematian bayi disatu wilayah kerja}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu yang sama}} \times 1000$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		4. Prevalensi stunting pada balita	- umur 0 sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut (TB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 Standar Deviasi	$= \frac{\text{Jumlah balita stunting (pendek dan sangat pendek)}}{\text{Jumlah balita yang diukur indeks } \frac{PB}{U} \text{ atau } TB/U} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Menurunnya Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	1. Persentase penyakit menular yang tertangani	Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasite mengenai penyakit menular terdiri dari Tuberkulosis (TB), <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV), Demam Berdarah (DB), malaria, diare, hepatitis	$= \frac{\text{Jumlah PM yang ditangani}}{\text{Jumlah kasus yang ada dikabupaten Banjar}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Penyakit menular yang tertangani adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah mwnngwbai Penanggulangan Penyakit Menular)</p>			
		<p>2. Persentase pengendalian dan pencegahan Penyakit Tidak Menular</p>	<p>Penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang atau kronis (Permenkes 71 tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular) terdiri dari Diabetes Melitus (DM), Hipertensi (HT) & Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat.</p>	$= \frac{\text{Jumlah penderita PTM yang dikendalikan dan dicegah}}{\text{Jumlah penderita PTM yang ada dikabupaten Banjar}} \times 100\%$	<p>Dinas Kesehatan</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan.</p>			
	<p>Meningkatnya Mutu pelayanan dan Sumber Daya kesehatan</p>	<p>1. Persentase Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi</p>	<p>Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.</p> <p>Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi tempat praktik mandiri tenaga kesehatan; pusat kesehatan masyarakat; klinik; rumah sakit; unit transfusi darah; laboratorium kesehatan; fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum</p>	$= \frac{\text{Jumlah fasyankes yang terakreditasi}}{\text{Jumlah seluruh fasyankes dikabupaten Banjar}} \times 100\%$	<p>Dinas Kesehatan</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>
		<p>2. Persentase Sumber Daya Manusia</p>	<p>Sumber Daya Manusia</p>	$= \frac{\text{Jumlah SDM dengan sertifikat dan kompetensi}}{\text{Jumlah seluruh SDM dikabupaten Banjar}} \times 100\%$	<p>Dinas Kesehatan</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Kesehatan dengan sertifikasi dan kompetensi sesuai standard/akreditasi kediklitan	Kesehatan terdiri dari 9 jenis nakes yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, kesehatan masyarakat, Kesehatan Lingkungan, kefarmasian, gizi, Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan sertifikasi dan kompetensi adalah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang lulus ujian kompetensi dan memiliki sertifikat sesuai dengan profesi masing-masing.			
9.	Mantapnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Untuk menganalisis tingkat ketahanan pangan adalah berdasarkan indikator yang telah terseleksi dengan penyusunan indeks tingkat ketahanan pangan pada masing-masing indikator. Indeks ketahanan pangan komposit diperoleh dari penjumlahan seluruh indeks indikator (9 indikator) kerentanan terhadap kerawanan pangan. Indeks komposit kerawanan pangan dihitung dengan cara sebagai berikut : $IFI = \frac{1}{9} (IAV + IBPL + IROADP + I LIT + ILEX + INUT + IWATER + IHEALTH)$ Keterangan : I Ketersediaan Pangan ; 1. Rasio konsumsi normative per kapita terhadap ketersediaan bersih	$IFI = \frac{1}{9} \{IAV + IBPL + IROADP + I LIT + ILEX + INUT + IWATER + IHEALTH\}$ Keterangan : I Ketersediaan Pangan ; 1. Rasio konsumsi normative per kapita terhadap ketersediaan bersih "padi + jagung + ubikayu + ubijalar" II Akses Terhadap Pangan dan Penghidupan; 2. Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan 3. Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai 4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik III Pemanfaatan Pangan ; 5. Angka harapan hidup saat lahir 6. Berat badan balita di bawah standar (underweight) 7. Perempuan buta huruf 8. Rumah tangga tanpa akses ke air bersih 9. Persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>“padi + jagung + ubikayu + ubijalar”</p> <p>II Akses Terhadap Pangan dan Penghidupan;</p> <p>2. Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan</p> <p>3. Persentase desa yang tidak memiliki akses penghubung yang memadai</p> <p>4. Persentase rumah tangga tanpa akses listrik</p> <p>III Pemanfaatan Pangan ;</p> <p>5. Angka harapan hidup saat lahir</p> <p>6. Berat badan balita di bawah standar (underweight)</p> <p>7. Perempuan buta huruf</p> <p>8. Rumah tangga tanpa akses ke air bersih</p> <p>9. Persentase rumah tangga yang tinggal lebih dari 5 km dari fasilitas kesehatan</p>			
	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan	<p>Nilai PDRB sektor perikanan atas dasar harga konstan pada tahun n sebesar Rp., lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar Rp. atau mengalami pertumbuhan sebesar xx%. dibandingkan dengan target pada tahun n sebesar xx% maka diperoleh capaian sebesar xx%</p>	$g = \frac{PDRB_{sektor\ t} + PDRB_{sektor\ t-1}}{PDRB_{sektor\ t-1}} \times 100\%$ <p><i>Keterangan :</i></p> <p><i>g = pertumbuhan sektor</i></p> <p><i>PDRB sektor t = PDRB Sektor pada tahun sekarang atau tahun yang akan dicari nilainya</i></p> <p><i>PDRB Sektor t-1 = PDRB Sektor pada tahun sebelumnya</i></p>	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Badan Pusat Statistik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
10.	Meningkatnya kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, statistik dan persandian	Perangkat Daerah adalah salah satu Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah internet yang disediakan 28 perangkat Daerah dari 47 termasuk OPD kecamatan	$= \frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Persentase tindak lanjut aduan yang ditangani dengan cepat sesuai dengan SOP	Pengaduan masyarakat atau laporan masyarakat yaitu 5 hari paling lambat selama 14 hari kerja	$= \frac{\text{Rata - rata lama hari penanganan aduan yang tertangani}}{\text{lama hari penanganan maksimal}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Meningkatnya kualitas data statistik sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Data statistik yang di gunakan dalam penyusunan dokumen Perangkat Daerah sebanyak 27 Perangkat Daerah dan 20 kecamatan yang ada di kabupaten banjar	$= \frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Meningkatnya Penerapan Persandian di Kabupaten Banjar	Persentase Keterhubungan Perangkat Daerah dalam jaring komunikasi sandi	Perangkat daerah yang menggunakan jaring komunikasi sandi 1 Perangkat Daerah	$= \frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
11.	Meningkatnya akselerasi industri pengolahan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri pengolahan (LPE Sektor industri)	Persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri pengolahan (LPE Sektor industri) merupakan perbandingan kenaikan/penurunan nilai PDRB sektor Industri Pengolahan Tahun berjalan terhadap nilai PDRB sektor Industri Pengolahan tahun sebelumnya	$= \frac{\text{PDRB sektor Industri Pengolahan tahun } N - \text{PDRB sektor Industri Pengolahan tahun } (N - 1)}{\text{PDRB Sektor Industri Pengolahan Tahun } (N - 1)} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	Badan Pusat Statistik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan (LPE Sektor Perdagangan)	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan merupakan perbandingan kenaikan/penurunan nilai PDRB sektor perdagangan (khususnya perdagangan besar dan eceran) Tahun berjalan terhadap nilai PDRB sektor perdagangan (khususnya perdagangan besar & Eceran) tahun sebelumnya	$\frac{PDRB \text{ sektor Perdagangan Besar Eceran Tahun } N - PDRB \text{ sektor Perdagangan Besar Eceran Tahun } (N - 1)}{PDRB \text{ sektor Perdagangan Besar \& Eceran Tahun } (N - 1)} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	Badan Pusat Statistik
	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase koperasi berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas merupakan perbandingan jumlah koperasi yang berkualitas berdasarkan RAT, Volume usaha dan aset terhadap jumlah seluruh koperasi	$= \frac{\sum \text{Koperasi yang berkualitas berdasarkan RAT, Volume Usaha Aset}}{\sum \text{koperasi}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha merupakan perbandingan Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha terhadap jumlah usaha mikro keseluruhan	$= \frac{\sum \text{usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\sum \text{usaha mikro}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
12.	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur dan Konektivitas Kabupaten	1. Indeks Konektivitas	Jaringan jalan dan jembatan diambil dari variabel : panjang jaringan jalan yang dibangun , jalan kabupaten dengan kondisi mantap, jembatan kabupaten dalam kondisi baik.	$= \frac{\text{Panjang Jalan Penghubung Pusat} - \sum \text{Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi (akhir tahun pencapaian SPM)}}{\sum \text{Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi (target keseluruhan)}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		2. Indeks Infrastruktur	Indeks infrastruktur dihitung dengan persentase pembobotan yakni :	1) Persentase Peningkatan Luasan Kawasan Perkotaan yang terlayani sistem jaringan drainase (10%); 2) Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman (30%); 3) Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Air Limbah (25%); dan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				4) Persentase Panjang Jaringan Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap (35%)		
		3. Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	Persentase Total Perusahaan atau Penyedia Jasa yang Aktif Terhadap Total Perusahaan di Kabupaten Banjar	$= \frac{\sum \text{Total Perusahaan atau Penyedia Jasa yang Aktif}}{\sum \text{Perusahaan di Kab. Banjar}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Meningkatnya Ketertiban Ruang dan Bangunan	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang dihitung dengan persentase pembobotan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang (70%) dan Persentase Ijin yang Dikeluarkan (30%)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Terselenggaranya Reformasi dalam Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Nilai IKM didapat dari survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan secara periodik. Survei kepuasan masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik, memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu: (1) Persyaratan, (2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, (3) Waktu Penyelesaian, (4) Biaya/Tarif, (5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, (6) Kompetensi Pelaksana, (7) Perilaku Pelaksana Pelayanan, (8) Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan Pelayanan, dan (9) Sarana dan prasarana.	$\text{Bobot Nilai Rata - Rata Tertimbang} = \frac{\sum \text{Bobot}}{\sum \text{Unsur}} \times 100\%$ $\text{IKM} = \frac{\sum \text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\sum \text{Total Unsur yang Terisi} \times \text{Nilai Penimbang}}$ $\text{Nilai Interval Konversi IKM} = \text{IKM Unit Pelayanan} \times 25$	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
13.	Terwujudnya perlindungan masyarakat melalui pelayanan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang terpadu	1. Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Banjar, terhitung sejak call center Damkar menerima informasi/ laporan dari masyarakat sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.	$= \frac{\text{Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di wilayah Kab. Banjar pada Tahun N}}{\text{Jumlah kasus yang diterima call center Damkar Kab. Banjar pada Tahun N}} \times 100\%$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		2. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi Non Kebakaran)	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia merupakan peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia, baik gangguan hewan berbahaya, Laka kerja, laka lantas, orang tenggelam, bencana alam dan dapat melakukan pencarian orang hilang yang terjadi di wilayah Kabupaten Banjar terhitung sejak diterima info masuk laporan masyarakat ke petugas Damkar dan Penyelamatan, sampai petugas teknis tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.	$= \frac{\text{Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) di wilayah Kab. Banjar pada Tahun N}}{\text{Jumlah kasus yang diterima call center Damkar Kab. Banjar pada Tahun N}} \times 100\%$	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
14.	Meningkatnya Kemajuan Pembangunan Desa	1. Persentase Desa Mandiri	Desa Mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Klasifikasi Desa Mandiri ditetapkan dengan ambang batas IDM > 0,8155	$= \frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah Seluruh Desa se Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2. Persentase Desa Maju	Desa Maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Klasifikasi Desa Maju ditetapkan dengan ambang batas $0,7072 < \text{IDM} \leq 0,8155$	$= \frac{\text{Jumlah Desa Maju}}{\text{Jumlah Seluruh Desa se Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		3. Persentase Desa Berkembang	Desa Berkembang adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Klasifikasi Desa Berkembang ditetapkan dengan ambang batas $0,5989 < \text{IDM} \leq 0,7072$	$= \frac{\text{Jumlah Desa Berkembang}}{\text{Jumlah Seluruh Desa se Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		4. Persentase Penurunan Desa Tertinggal	Desa Tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Klasifikasi Desa Tertinggal ditetapkan dengan ambang batas $0,4907 < IDM \leq 0,5989$	$\frac{\text{Desa Tertinggal Tahun Sebelumnya} - \text{Desa Tertinggal Tahun Sekarang}}{\text{Jumlah Desa Tertinggal Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15.	Meningkatnya Nilai Investasi dan Pelayanan Publik	1. Nilai Investasi	Realisasi Investasi tahunan yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang ada di Kabupaten Banjar	Nilai realisasi investasi yang masuk dibuat dalam satuan rupiah (Rp) dalam 1 tahun. Realisasi Investasi diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap kualitas pelayanan publik yaitu pelayanan perizinan dan non perizinan	$\text{Nilai Indeks} = \sum \sum (\text{Nilai unsur pelayanan} \times 0,11)$ $\text{Nilai IKM} = \text{Nilai Indeks} \times 25$	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16	Meningkatnya Akses Pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang, digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan.	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan : $HLS_a^t = \text{Harapan Lama Sekolah pada umur } a \text{ di tahun } t$ $E_i^t = \text{Jumlah penduduk usia } i \text{ yang bersekolah pada tahun } t$ $P_i^t = \text{Jumlah penduduk usia } i \text{ pada tahun } t$ $i = \text{usia } (a, a + 1, \dots, n)$ $FK = \text{faktor koreksi pesantren}$	Dinas Pendidikan	Badan Pusat Statistik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.	$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke } - i)$ Dengan : $P_{15+} = \text{Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas}$ $\text{Lama sekolah penduduk ke } - i =$ a. Tidak pernah sekolah = 0 b. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 c. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 d. Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir e. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1	Dinas Pendidikan	Badan Pusat Statistik
	Meningkatnya Mutu Pendidikan	1 Angka Kelulusan SD	Jumlah peserta didik lulusan pada jenjang SD, dihitung dengan perbandingan jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang SD pada tahun ajaran sebelumnya	$AL\ SD = \frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		2 Angka Kelulusan SMP	Angka kelulusan SMP adalah Jumlah peserta didik lulusan pada jenjang SMP, dihitung dengan perbandingan jumlah peserta didik tingkat tertinggi pada jenjang SMP pada tahun ajaran sebelumnya	$AL\ SMP = \frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
17.	Meningkatnya konektivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi	Rasio Konektivitas	Keterjangkauan daerah untuk mencapai moda transportasi darat dan sungai	$= ((IK1 \times \text{persentase bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{persentase bobot angkutan sungai, Danau dan Penyeberangan}))$ dengan : $IK1 (\text{angkutan jalan}) = \frac{\text{Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota} \times \text{bobot trayek}}{\text{Jumlah Kebutuhan trayek pada kabupaten/kota}}$	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				<p><i>IK2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan)</i> <i>Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/kota × bobot lintas</i> $= \frac{\text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/kota} \times \text{bobot lintas}}{\text{Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kab/kota}}$</p> <p><i>Keterangan :</i> <i>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan, untuk wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (Bobot angkutan SDP = 30, bobot angkutan Jalan = 70)</i> <i>obot Trayek atau Lintas :</i> <i>Bobot trayek atau lintas dengan frekuensi tinggi (> 5x dalam seminggu), bobot = 1</i></p>		
18.	Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	<p>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah Indeks yang mengukur perkembangan literasi Masyarakat berdasarkan perbandingan antara unsur pembangunan literasi masyarakat dengan aspek masyarakat.</p> <p>Unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) adalah Aspek Pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat, jumlah perpustakaan ber SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, dan anggota perpustakaan.</p>	$IPLM = \sum_i \frac{UPLM_i}{AM_i} \times 100$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)	<p>Aspek masyarakat (AM) adalah jumlah total penduduk atau masyarakat pada suatu wilayah yang disesuaikan dengan segmentasi jenis perpustakaan.</p> <p>Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat adalah Tingkat Perilaku atau Kebiasaan Masyarakat dalam Memperoleh Pengetahuan dan Informasi dari Berbagai Bentuk Media berdasarkan aspek frekuensi membaca (FM), durasi membaca (DM), jumlah buku yang dibaca (JB), frekuensi akses internet (FAI), dan durasi akses internet (DAI)</p>	$TGM = (0,3 FM + 0,3 DM + 0,3 JB) + (0,05 FAI + 0,05 DAI)$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Pengelolaan Kearsipan Daerah Berkualitas	Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip (IKPA)	<p>Indeks kualitas pengelolaan arsip adalah Nilai yang menggambarkan kualitas pengelolaan arsip pada unit kearsipan I (LKD) dan pengelolaan arsip pada unit kearsipan II (SKPD) melalui Pengawasan Kearsipan Eksternal dan Pengawasan Kearsipan Internal</p> <p>LAKE adalah laporan audit kearsipan eksternal. LAKI adalah laporan audit kearsipan internal.</p>	$IKPA = 60\% LAKE + 40\% LAKI$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Arsip Nasional Republik Indonesia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
19.	Peningkatan Produksi Pertanian	Persentase Peningkatan Produksi Pertanian	Merupakan jumlah produksi pertanian pada tahun berkenaan (n) dikurangi jumlah produksi pertanian pada tahun sebelumnya (n-1) dibagi jumlah produksi pertanian pada tahun sebelumnya (n-1) dikali 100 persen Komoditas produksi pertanian yang diperhitungkan adalah komoditas unggulan daerah, yaitu pangan (padi), hortikultura (jeruk, pisang, durian, cabe), perkebunan (karet) dan peternakan (ternak besar)	$Q_{(n)} = \frac{Q((n)) - Q((n-1))}{Q((n-1))} \times 100$ <p><i>Keterangan :</i> $Q(\%) = \text{persentase peningkatan produksi pertanian}$ $Q(n) = \text{jumlah produksi pertanian pada tahun berkenaan (n)}$ $Q(n-1) = \text{jumlah produksi pertanian pada tahun sebelumnya (n-1)}$</p>	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
20.	Meningkatnya perumahan yang layak huni	1. Persentase rumah Layak Huni	Meningkatnya rumah layak huni	$= \frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah rumah keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		2. Persentase PSU yang memadai	Terpenuhinya PSU minimal 3 komponen dari 7 komponen	$= \frac{\text{Jumlah perumahan dan permukiman yang telah memenuhi min 3 komponen PSU}}{\text{Jumlah Perumahan dan Permukiman}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Kawasan Permukiman yang layak	1. Persentase kawasan kumuh layak	Penanganan terhadap kawasan kumuh yang telah ditetapkan oleh Keputusan Bupati	$= \frac{\text{luas total kawasan kumuh dikurangi luas kawasan kumuh yang ditangani}}{\text{luas total kawasan kumuh di Kabupaten Banjar}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air	Kumulatif nilai IP air pada titik-titik pemantauan	$= \sum (\text{persentase status IP air} \times \text{bobot})$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		2. Indeks Kualitas Udara	Perbandingan nilai rata-rata tahunan parameter SO ₂ dan NO ₂ terhadap baku mutunya	$= 100 - ((50 \div 0,9) \times (PU - 0,1))$ <i>Keterangan :</i> <i>PU = Indeks Pencemar Udara</i> <i>PU = 50% INDEKS SO₂ + 50% INDEKS NO₂</i>	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai Yang Menggambarkan Kualitas Tutupan Lahan Yang Dihitung Dari Kondisi Tutupan Hutan dan Tutupan Vegetasi Non Hutan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <i>Keterangan :</i> <i>IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</i> <i>TL = Tutupan Lahan</i>	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Meningkatkan Perlindungan Pengelolaan, Pembinaan dan Penuaan Lingkungan Hidup	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Lingkungan Terhadap Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, Izin RPPLH	Kesesuaian Pemanfaatan Lingkungan Terhadap Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, Izin RPPLH	$= \frac{\text{Pemanfaatan Lingkungan}}{\text{Kesesuaian Terhadap Dokumen Lingkungan, Izin Lingkungan, Izin RPPLH}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya Penanganan / Pengelolaan Sampah	Persentase Timbulan Sampah Yang Tertangani	Persentase Timbulan Sampah Perkotaan Yang Tertangani	$= \frac{\text{Jumlah Timbulan Sampah Perkotaan}}{\text{Sampah Perkotaan Yang Di Tangani}} \times 100\%$	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
21.	Berkembangnya reformasi sistem perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	<p>Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. PPKS terbagi menjadi 26 jenis, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak Balita Terlantar 2. Anak Terlantar 3. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum 4. Anak Jalanan 5. Anak Dengan Kedisabilitas 6. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 7. Lanjut Usia Terlantar 8. Penyandang Disabilitas 9. Tuna Susila 10. Gelandangan 11. Pengemis 12. Pemulung 13. Kelompok Minoritas 14. Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan 15. Orang dengan HIV/AIDS 16. Korban Penyalahgunaan NAPZA 17. Korban Trafficking 18. Korban Tindak Kekerasan 	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang Mandiri}}{\text{Jumlah PPKS Seluruhnya}} \times 100\%$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			19. Pekerja Migran Bermasalah Ekonomi 20. Korban Bencana Alam 21. Korban Bencana Sosial 22. Wanita Rawan Sosial Ekonomi 23. Fakir Miskin 24. Keluarga Bermasalah Ekonomi 25. Berumah Tidak Layak Huni 26. Komunitas Adat Terpencil Mandiri yang di maksud yaitu mampu berkehidupan sosial di masyarakat dengan bantuan-bantuan baik bersifat konsumtif atau berupa barang untuk beraktifitas sosial			
	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan serta Perlindungan Anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik.	$IDG = \frac{1}{3} (Ipar + IDM + Lin - Dist)$ Ipar = indeks keterwakilan di parlemen IDM = indeks pengambilan keputusan Linc-Dist = indeks distribusi pendapatan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pusat Statistik
		2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indikator menggambarkan capaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai amanat Konvensi Hak Anak (KHA)	$IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times Indeks K_j)$ 1. Hak Sipil dan Kebebasan (20%) 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (22%) 3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (18%) 4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (18%) 5. Perlindungan Khusus (22%)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3. Persentase Perlindungan Hak Perempuan	Pemberian layanan terhadap hak perempuan yang mengalami kekerasan meliputi pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan, pendampingan tokoh agama dan rumah aman	$\frac{\text{Jumlah Layanan yang Diberikan kepada Perempuan}}{\text{Jumlah Layanan Laporan Kasus Kekerasan Perempuan}} \times 100\%$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)/Angka Kelahiran Total adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ <p><i>ASFR_i: ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke - i</i> <i>i = kelompok usai 15 - 19, 20 - 24 45 - 49</i></p>	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Badan Pusat Statistik
		2. Indeks Pembangunan Keluarga	Suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga.	$\frac{\text{indek pembangun keluarga} = \text{indeks ketentraman} + \text{indeks kemandirian} + \text{indeks kebahagiaan}}{3}$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22.	Fasilitasi Penyediaan Lapangan Kerja Baru	Tingkat Pengangguran Terbuka	Penganggur terbuka, terdiri dari: Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.	$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)} = \frac{\text{jumlah Pengangguran (PP)}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja (PAK)}} \times 100\%$ <p><i>Keterangan:</i> <i>TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%)</i> <i>PP : Jumlah pengangguran (orang)</i> <i>PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)</i></p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Badan Pusat Statistik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Fasilitasi penguatan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial serta SDM kawasan Ex. Transmigrasi	Persentase Kawasan Ex. Transmigrasi Yang Maju	Ex. Transmigrasi adalah Desa yg memiliki sumber daya sosial dan ekonomi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa , kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan, Adapun Jumlah desa ex. transmigrasi berjumlah 19 UPT adalah sebagai berikut : Kec. Sungai Pinang : 1. Kahelaan, 2. Rantau bakula, 3. Rantau nangka. 4. Sumber baru, 5. Sumber harapan, 6. Belimbing lama, 7. Belimbing Baru. 8. Hakim Makmur ,: Kec. Simpang Empat : 1. Galam Rabah I, 2. Galam Rabah II, 3. Galam Rabah III, 4. Galam Rabah IV, 5. Galam Rabah 5, 6. Belanti II , 7. Cintapuri , : Kec. Sungai Tabuk : 1. Riam kanan I : Kec. Aluh-aluh: 1. Tambak Padi, : Kec. Paramasan : 1. Angkipih : Kec. Martapura : 1. Riam Kanan II	$= \frac{\text{Jumlah kawasan ex. Transmigrasi yang Maju}}{\text{Jumlah kawasan ex, transmigrasi keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
23.	Mewujudkan Pengawasan Yang Berkualitas Dan Efektif	1. Indeks Integritas Target: 71,66	Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei yang dilakukan untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi, dalam ruang lingkup budaya organisasi, sistem anti korupsi, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengelolaan anggaran yang terbentuk dari angka skala 1 hingga 100.	Survei oleh Komisi Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Daerah	Komisi Pemberantasan Korupsi

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA																								
			<p>Nilai Indeks Integritas semakin tinggi, maka sistem yang berjalan semakin baik dalam mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi.</p>																											
		<p>2. Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Target: 80%</p>	<p>Penilaian mandiri indikator kepatuhan dan kinerja intern perangkat daerah (IKKI) merupakan salah satu instrument untuk menilai tata kelola, manajemen risiko dan kematangan sistem pengendalian intern perangkat daerah di Kabupaten Banjar</p>	<p><i>Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern</i> $= \sum (\text{unsur kinerja utama} \times 40\%)$ $+ (\text{unsur kepatuhan} \times 30\%)$ $+ (\text{unsur pelayanan umum} \times 30\%)$</p> <p><i>Nilai hasil akhir dari penjumlahan unsur-unsur akan dipergunakan untuk menentukan indikator kepatuhan dan kinerja intern perangkat daerah dengan kategori :</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai Angka</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>A</td> <td>>90-100</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BB</td> <td>>80-90</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>B</td> <td>>70-80</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CC</td> <td>>60-70</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>C</td> <td><60</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	1	A	>90-100	Memuaskan	2	BB	>80-90	Sangat Baik	3	B	>70-80	Baik	4	CC	>60-70	Cukup	5	C	<60	Kurang	Inspektorat Daerah	Inspektorat
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi																											
1	A	>90-100	Memuaskan																											
2	BB	>80-90	Sangat Baik																											
3	B	>70-80	Baik																											
4	CC	>60-70	Cukup																											
5	C	<60	Kurang																											
		<p>3. Indeks Persepsi Kualitas Layanan APIP Target : 4,20</p>	<p>Indeks Persepsi Kualitas Layanan APIP diperoleh berdasarkan survei pengguna dengan responden seluruh objek pengawasan. Survei dilakukan terhadap aspek keahlian (kompetensi), aspek kinerja dan aspek perilaku</p>	<p><i>Persepsi Keahlian + Persepsi Kinerja + Persepsi Perilaku</i> $= \frac{\text{Persepsi Keahlian} + \text{Persepsi Kinerja} + \text{Persepsi Perilaku}}{3}$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kategori</th> <th>Nilai Angka</th> <th>Interpretasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>A</td> <td>>90-100</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>BB</td> <td>>80-90</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>B</td> <td>>70-80</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CC</td> <td>>60-70</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>C</td> <td><60</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi	1	A	>90-100	Memuaskan	2	BB	>80-90	Sangat Baik	3	B	>70-80	Baik	4	CC	>60-70	Cukup	5	C	<60	Kurang	Inspektorat	Inspektortat
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi																											
1	A	>90-100	Memuaskan																											
2	BB	>80-90	Sangat Baik																											
3	B	>70-80	Baik																											
4	CC	>60-70	Cukup																											
5	C	<60	Kurang																											

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
24.	Meningkatnya Mutu Pelayanan RSUD Ratu Zalecha	1. IKM Rumah Sakit	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) adalah tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari rumah sakit, melalui kuisisioner yang dibagikan kepada pengunjung Rumah Sakit	$= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	RSUD RATU ZALECHA	RSUD RATU ZALECHA
		2. Akreditasi Rumah Sakit	Akreditasi Rumah sakit adalah pengakuan terhadap ukuran kinerja, struktur dan proses yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen rumah sakit karena telah memenuhi standar yang ditetapkan dengan menggunakan penilaian dari LIPA (Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi).	Hasil penilaian 16 Bab melalui survei akreditasi RS oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan minimal 15 Bab lulus	RSUD RATU ZALECHA	Lembaga Independen Penyelenggara Akreditasi,
		3. SPM Rumah Sakit	Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. SPM RS meliputi : Indikator-Indikator yang menjadi standar dalam pencapaian target di unit/ Instalasi/ Bidang tertentu. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berkualitas dan dinilai melalui hasil cakupan masing masing program/ kegiatan yang dilakukan oleh Tim Penilai internal RS	$= \frac{\text{Hasil penilaian SPM yang terpenuhi}}{\text{Nilai capaian SPM yang harus dipenuhi}} \times 100 \%$	RSUD RATU ZALECHA	RSUD RATU ZALECHA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
25.	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	1. Persentase penurunan angka pelanggaran perda dan perkara	<p>1. Persentase penurunan angka pelanggaran perda dan perkara merupakan ukuran atas perwujudan situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah</p> <p>2. Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum</p> <p>3. Pelanggar Gangguan Trantibum adalah masyarakat ataupun badan hukum yang melakukan perilaku tidak tertib baik yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum</p> <p>4. Pelanggaran Perda adalah masyarakat dan badan hukum yang melakukan perilaku tidak tertib yang melanggar Peraturan daerah dan perkara yang memuat sanksi</p>	$\frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan gangguan trantibum pada tahun } n - \text{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan gangguan trantibum yang terjadi pada tahun 2020 (data awal)}}{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Perda dan gangguan trantibum yang terjadi pada tahun 2020 (data awal)}} \times 100 \%$	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>5. Data Awal adalah angka pelanggaran Perda dan gangguan trantibum yang terjadi pada tahun 2020 dimana jumlah angka pelanggaran Perda dan gangguan trantibum berjumlah 1002 pelanggaran</p> <p>6. Ruang Lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tertib tata ruang. b) Tertib jalan c) Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai d) Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum. e) Tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai. f) Tertib lingkungan. g) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu. h) Tertib bangunan. i) Tertib sosial. j) Tertib kesehatan. k) Tertib tempat hiburan dan keramaian. l) Tertib peran serta masyarakat. 			

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			m) Ketentuan lain sepanjang telah di tetapkan dalam peraturan daerah masing-masing.			
		2. Persentase Satlinmas Aktif	<p>1. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas</p> <p>2. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan</p> <p>3. Anggota Satlinmas Aktif adalah :</p> <p>a) melaksanakan dan membantu tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja maupun dalam menanggulangan bencana baik sebelum terjadi bencana, pada saat bencana dan pada pasca bencana</p> <p>b) melaksanakan dan membantu tugas dan fungsi di pemerintahan tingkat desa/kelurahan</p>	$= \frac{\text{Jumlah Satlinmas Aktif se Kabupaten Banjar}}{\text{Jumlah Satlinmas sekabupaten Banjar}} \times 100 \%$	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<p>1. Dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dilakukan oleh tim pengumpul data sesuai Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan variatif waktu pengambilan survei. Ada beberapa teknik survei yang dipakai seperti wawancara tatap muka langsung kepada responden atau responden mengisi sendiri kuesioner yang diberikan.</p> <p>2. Adapun pertanyaan yang dimintakan pendapat kepada masyarakat terdiri dari 9 unsur yang relevan, valid dan reliabel dengan harapan masyarakat memberikan pendapatnya terhadap 4 pilihan jawaban yang tersedia sebagaimana kuisisioner terlampir dan sebagai instrumen penilaian dan evaluasi kinerja pelayanan publik di lingkungan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar</p>	<p>Sesuai dengan peraturan perundang-undangan:</p> <p>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>2. Peraturan Bupati Banjar Nomor 59 Tahun 2020 tentang pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar</p> <p>3. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan</p> <p>25,00 – 64,99 D Tidak Baik 65,00 – 76,60 C Kurang Baik 76,61 – 88,30 B Baik 88,31 – 100 A Sangat Baik</p>	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
26.	Meningkatnya Pengoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Pengoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	Pengoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat	$= \frac{\text{Jumlah Rakoor yang dilaksanakan}}{\text{Rakoor yang direncanakan/diusulkan}} \times 100$	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		2. Nilai LPPD	Berupa menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik	penilaian yang diberikan oleh Kemendagri	Sekretariat Daerah	Kementerian Dalam Negeri
	Meningkatnya Pengoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	1. Persentase Pengoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	Penoordinasian Dalam Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	$= \frac{\text{Jumlah Rakoor yang dilaksanakan}}{\text{Rakoor yang direncanakan/diusulkan}} \times 100$	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		2. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Predikat Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal "BAIK" dari LKPP	Hasil Kumulatif Penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Oleh LKPP	Sekretariat Daerah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
	Meningkatnya Pengoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	1. Persentase Pengoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	Pengoordinasian Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	$= \frac{\text{Jumlah Rakoor yang dilaksanakan}}{\text{Rakoor yang direncanakan/diusulkan}} \times 100$	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		2. Nilai SAKIP	Peringkat yang diberikan oleh Kemenpan setiap tahunnya yang mencerminkan tingkat akuntabilitas perangkat daerah dalam mempertanggung jawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis	Nilai yang diberikan oleh Kemenpan	Sekretariat Daerah	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3. Nilai IKM Kab. Banjar	Nilai Kumulatif hasil Survey Kepuasan Masyarakat dari unit pelayanan publik	= <i>Nilai SKM unit penyelenggara pelayanan publik</i> × 25	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
		4. Indikator Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	Peringkat/Nilai yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar setiap Semester yang mencerminkan tingkat Kepatuhan dan Kinerja Intren pada perangkat daerah	Peringkat/Nilai yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar	Sekretariat Daerah	Inspektorat
27.	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD	Survei terhadap tingkat kepuasan unsur Pimpinan dan Anggota DPRD menunjukkan komitmen untuk terus memacu peningkatan kinerja pelayanan	= <i>Nilai Rata – rata unsur pelayanan Tahun n</i> × <i>Nilai Penimbang</i> <i>Keterangan :</i> <i>Nilai Penimbang = 25</i>	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
28.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	= $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Aluh-Aluh	Sekretariat Daerah
29.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat	= $\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Aspek yang dinilai meliputi :	Pemerintah Kecamatan Aranio	Sekretariat Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)		
30.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya	$= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Astambul	Sekretariat Daerah
31.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya	$= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.	Pemerintah Kecamatan Beruntung Baru	Sekretariat Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)		
32.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Cintapuri Darussalam	Sekretariat Daerah
33.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.	Pemerintah Kecamatan Gambut	Sekretariat Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)		
34.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Karang Intan	Sekretariat Daerah
35.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.	Pemerintah Kecamatan Kertak Hanyar	Sekretariat Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)		
36.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Martapura	Sekretariat Daerah
37.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	$= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.	Pemerintah Kecamatan Martapura Barat	Sekretariat Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)		
38.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Martapura Timur	Sekretariat Daerah
39.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.	Pemerintah Kecamatan Mataraman	Sekretariat Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)		
40.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	$= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Paramasan	Sekretariat Daerah
41.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.	Pemerintah Kecamatan Pengaron	Sekretariat Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)		
42.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Sambung Makmur	Sekretariat Daerah
43.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.	Pemerintah Kecamatan Sungai Tabuk	Sekretariat Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)		
44.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Simpang Empat	Sekretariat Daerah
45.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.	Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang	Sekretariat Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)		
46.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat. Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)	Pemerintah Kecamatan Tatah Makmur	Sekretariat Daerah
47.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Pengukuran kinerja kecamatan Kinerja terhadap tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kecamatan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat di wilayah kerjanya.	$= \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$ Aspek yang dinilai meliputi : Aspek Administrasi, Aspek Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Aspek Pelayanan Publik, Aspek Kesejahteraan Sosial, Aspek Ketentraman dan Ketertiban, Aspek Pemerintahan Umum dan Pelimpahan Kewenangan, dan Aspek Pemberdayaan Masyarakat.	Pemerintah Kecamatan Telaga Bauntung	Sekretariat Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR TUJUAN (IKU)	PENJELASAN / DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Rencana Range Nilai : 50-59 (Sangat Rendah) 60-69 (Rendah) 70-79 (Sedang) 80-89 (Baik/Tinggi) 90-100 (Sangat Baik/Sangat Tinggi)		

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR